

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

JENIS LAPORAN

Laporan Khusus

☐ Calon Penyelenggara Negara (PN)

☒ Awal Menjabat

☐ Akhir Menjabat

Tanggal Pelaporan :

Laporan Periodik

☐ Sedang Menjabat

Tahun Pelaporan

1. Gelar/ Nama*/ Gelar

2. Jabatan*/Unit Kerja*

3. Sub-Unit Kerja/Lembaga*

4. Alamat Kantor

/ MUKTAMAR HAMDI

KEPALA BIRO

BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

JL. A. YANI NO. 01 TELANAIPURA - JAMBI

/ SE., MM

BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI

I. RINGKASAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

1. HARTA TIDAK BERGERAK (TANAH DAN/ATAU BANGUNAN)	Rp	1.950.000.000
2. HARTA BERGERAK (ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN)	Rp	135.000.000
3. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp	14.000.000
4. SURAT BERHARGA	Rp	-
5. KAS DAN SETARA KAS	Rp	72.029.809
6. HARTA LAINNYA	Rp	-
TOTAL HARTA	Rp	2.171.029.809
7. HUTANG	Rp	237.200.000
TOTAL HARTA KEKAYAAN	Rp	1.933.829.809

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa

- Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ini Saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar, tanpa tekanan maupun paksaan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan (baik penambahan maupun pengurangan) harta kekayaan Saya dan keluarga Saya, maka Saya wajib melaporkan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan Saya dan keluarga Saya yang menjadi tanggungan Saya tidak Saya laporkan, maka Saya bersedia untuk bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Untuk memenuhi asas akuntabilitas dan transparansi, saya bersedia apabila lembar Ringkasan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ini ditempatkan dalam media pengumuman KPK dan atau instansi sebagai informasi awal bagi publik.

JAMBI, 20/02/2018
yang melaporkan,

(MUKTAMAR HAMDI SE., MM)

"Laporan harta kekayaan ini sesuai dengan yang dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dan tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana"